

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK PENGHAPUSAN
UANG MUKA AKIBAT KETERLAMBATAN PEMBAYARAN
DALAM JUAL BELI KREDIT
(Studi di Toko Elektronik Sony Desa Bungkok Kecamatan Marga
Sekampung Kabupaten Lampung Timur)**

SKRIPSI

Oleh :

SISNA FEBRIYANI

NPM : 1721030073



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/ 2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK
PENGHAPUSAN UANG MUKA AKIBAT KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN
DALAM JUAL BELI KREDIT
(Studi di Toko Elektronik Sony Desa Bungkok Kecamatan Marga
Sekampung Kabupaten Lampung Timur)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

**SISNA FEBRIYANI
NPM : 1721030073**

Progran Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.
Pembimbing II : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/ 2021 M**

ABSTRAK

Jual beli kredit merupakan suatu transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli dalam hal pemindahan hak kepemilikan suatu benda yang di dahului dengan akad dan penyerahannya sejumlah uang muka (DP) yang telah di tentukan. Praktik jual beli kredit menggunakan uang muka (DP) tersebut terjadi di Toko elektronik Sony Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, di mana praktik tersebut terjadi antara pemilik toko elektronik Sony dengan pembeli. Praktik jual beli kredit barang elektronik tersebut dalam penerapannya apabila dalam 3 bulan angsuran tidak dibayarkan maka uang muka (DP) akan dihapuskan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik penghapusan uang muka dalam jual beli kredit barang elektronik di toko elektronik Sony Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik penghapusan uang muka tersebut. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik penghapusan uang muka dalam jual beli kredit barang elektronik di toko elektronik Sony Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penghapusan uang muka tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan pada toko elektronik Sony Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data melalui tahap editing dan sistematisasi data. Dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik penghapusan uang muka dalam jual beli kredit barang elektronik di toko elektronik Sony Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur apabila pembeli tidak sanggup membayar angsuran selama 3 bulan maka uang muka yang dibayarkan itu terhitung hangus dan otomatis masa angsuran-nya diperpanjang. Dalam tinjauan hukum Islam hal yang seperti ini tidak diperbolehkan apabila tidak ada kesepakatan di awal akad antara pihak penjual dan pembeli, juga adanya unsur kedzaliman karena salah satu pihak dirugikan.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sisna Febriyani
NPM : 1721030073
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penghapusan Uang Muka Akibat Keterlambatan Pembayaran Dalam Jual Beli Kredit (Studi Di Toko Elektronik Sony Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur)" adalah benar – benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dengan *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 2021
Penulis,



Sisna Febriyani
NPM. 1721030073



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp: 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penghapusan
Uang Muka Akibat Keterlambatan Pembayaran Dalam
Jual Beli Kredit (Studi di Toko Elektronik Sony Desa
Bungkuk Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten
Lampung Timur)**

Nama : Sisna Febriyani

NPM : 1721030073

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

**Untuk dapat di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag
NIP. 197012282000031002**

Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.

**Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp: 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK PENGHAPUSAN UANG MUKA AKIBAT KETERLAMBATAN PEMBAYARAN DALAM JUAL BELI KREDIT**, disusun oleh **Sisna Febriyani, NPM. 1721030073**, jurusan **Muamalah** telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Tim Penguji

Ketua Sidang : Marwin, S.H., M.H.

Sekretaris : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.

Penguji 1 : Drs. Hj. Numazli, S.Ag., S.H., M.H.

Penguji II : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

Penguji III : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag. M.H

NPM. 17208262003121002

MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.
(Q.S. An-Nisaa (4) : 29)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada :

1. Ayahanda M. Yunus dan Ibunda Fatimah tercinta yang telah melindungi, mengasuh, menyayangi dan mendidik saya sejak dari kandungan hingga dewasa. Senantiasa mendo'akan dan sangat mengharapkan keberhasilan saya. Berkat do'a restu keduanya sehingga peneliti dapat menyelesaikan kuliah ini. Semoga semua ini merupakan hadiah untuk kedua orang tua saya.
2. Kakak dan adikku tersayang, Ayunda Maila Yunfa Safitri, Kakanda Komaruddin dan Ananda Fathur Nur Rohim, yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat serta motivasi bagi keberhasilan saya selama studi.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Sisna Febriyani dilahirkan di Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 02 Februari 1999. Peneliti adalah anak ke 2 dari 3 saudara. Terlahir dari pasangan buah cinta dan kasih sayang pasangan ayahanda M. Yunus dan ibunda Fatimah.

Pendidikan dimulai dari SDN 1 Bungkok dan selesai pada tahun 2010. SMPN 1 Marga Sekampung, selesai pada tahun 2013. MAN I Lam-Tim, selesai pada tahun 2017. Ketiga dijalani dan diselesaikan dengan lancar. Kemudian mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi syariah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I TA. 2017/2021.

Tahun 2018 peneliti bergabung dan aktif dalam organisasi ekstra kampus yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung Komisariat Syariah.



Bandar Lampung, 2021
Penulis,

Sisna Febriyani
NPM. 1721030073

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah Robbil ‘Alamin, segala puji bagi Allah SWT, pengenggam diri bagi seluruh ciptaan-Nya dengan kasih sayang-Nya yang telah memberikan Hidayah, Taufik dan Rahmat-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Tokoh Politik Dunia, pemimpin Umat, Baginda Nabi Muhammad Saw, yang telah mewariskan dua sumber cahaya kebenaran dalam perjalanan manusia hingga akhir zaman yaitu al-Qur’an dan Hadits. Dalam penelitian skripsi ini, peneliti mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu tidak lupa peneliti mengucapkan terimakasih, kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. DR. H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. A. Khumaidi Ja’far, S.Ag. M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.Si selaku sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Herlina Kurniati, S.H.I.,M.E.I. selaku pembimbing II, yang telah memberikan pengarahan dan juga bimbingan yang amat baik dan memotivasi saya selama menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah yang telah ikhlas memberikan ilmu-ilmu dan motivasi peneliti dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala staf Perpustakaan Syariah, Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung, beserta staf karyawan atas diperkenankannya penulis meminjam literatur yang telah dibutuhkan.
7. Kepada teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 baik dari jurusan MU, HTN, AS, dan adik-adik tingkat di semua jurusan yang selalu mendo’akan, memberi semangat dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini terutama: Bela Sari, Dede Marfu’ah, Enda Oktavia, Siti Haryanti.

8. Kepada keluarga besar HMI Cabang Bandar Lampung terlebih khusus Komisariat Syariah, terimakasih untuk ilmu dan pengalaman yang sangat berharga ini.
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu pengetahuan serta pengalaman yang tidak bisa dilupakan.

Semoga amal dan jasa, bantuan dan petunjuk serta dorongan yang telah diberikan dicatat Allah Swt., sebagai amal shalih dan memperoleh Ridha-Nya., dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi amal shalih. Amin Ya Rabbal'Alamin.

Bandar Lampung, 2021

Penulis

Sisna Febriyani
NPM.1721030073



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Penelitian	4
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	5
H. Metode Penelitian	8
I. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli	13
1. Pengertian Jual Beli	13
2. Dasar Hukum Jual Beli	15
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	17
4. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam	25
5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli	29
6. Macam-Macam Jual Beli	30
B. Jual Beli Secara Kredit	33
1. Pengertian Jual Beli Kredit	33
2. Hukum jual beli kredit	35

C. Jual Beli Bayar di Muka	39
1. Pengertian Jual Beli Bayar di Muka (Ba’I Al- 'Urbun) ...	39
2. Hukum Jual Beli Bayar di Muka	41

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Toko Elektronik Sony Desa Bunguk Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur.....	45
B. Penghapusan Uang Muka Akibat Keterlambatan Pembayaran Dalam Jual Beli Kredit.....	48

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik penghapusan uang muka dalam jual beli kredit barang elektronik Sony di Desa Bunguk Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur	57
B. Tinjauan hukum Islam tentang praktik penghapusan uang muka dalam jual beli kredit barang elektronik Sony di Desa Bunguk Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur.....	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Rekomendasi	64

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 3.1 Tentang Jenis Dan Harga Barang-Barang Elektronik	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 3.1 tentang Struktur Kepengurusan Toko Sony Eletronik.....	49



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat izin penelitian
2. Surat Rekomendasi
3. Daftar pertanyaan wawancara
4. Surat keterangan wawancara
5. Blanko konsultasi
6. Turnitin



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian ini berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penghapusan Uang Muka Akibat Keterlambatan Pembayaran Dalam Jual Beli Kredit". Untuk menghindari kesalah pahaman judul di atas, maka perlu ditegaskan beberapa istilah penting, yang terdapat pada judul tersebut antara lain :

1. Tinjauan Hukum Islam

Tinjauan dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pandangan atau pendapat. Secara istilah tinjauan adalah “pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian yang di sajikan secara sistematis dan objektif, untuk memecahkan suatu permasalahan”¹

Hukum Islam adalah hukum-hukum Allah SWT yang kewajibannya telah diatur secara jelas dan tegas dilakukan di dalam Al-Qur'an atau hukum-hukum yang di tetapkan secara langsung oleh wahyu, misalnya: kewajiban sholat, zakat, puasa, haji, sedangkan permasalahan yang belum jelas dalam Al-Qur'an perlu penafsiran untuk menentukan hukum baru dari permasalahan tersebut yang dinamakan dengan istilah fiqih.²

2. Uang Muka

Uang muka (panjar) dalam bahasa Arab adalah 'Urbun (العربون). Kata ini memiliki padanan kata (sinonim) dalam bahasa Arabnya yakni, *Urbaan* (الأربان), 'Urbaan (العربان) dan *Urbun* (الأربون). Secara bahasa artinya yang jadi transaksi dalam jual beli. Berkata penulis kitab Al Misbah Al Munier “Al Arabun dengan di-fathah-kan huruf 'Ain dan Ra' nya.”³

¹ Alwi Hasan dan Dendi Sugono, *Telaah Bahasa dan Sastra*, ed. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002).

² Siti Mahmudah, *Historisitas Syari'ah (Kritik Relasi-Kuasa Khalil 'Abd al-Karim)*, ed. (Yogyakarta: LkiS pelangi Aksara, 2016), 197.

³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 118.

3. Jual Beli Kredit

Jual beli kredit secara bahasa ialah membagi-bagi sesuatu dan memisah-misahkannya menjadi beberapa bagian yang terpisah.⁴ Sedangkan secara istilah adalah transaksi jual beli dengan system bayar cicilan (kredit) dalam batas waktu tertentu dengan *thaman* yang relatif lebih tinggi dibanding *thaman* dengan system bayar *cash*.⁵

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa maksud judul skripsi ini adalah meninjau dari segi hukum Islam mengenai praktik penghapusan uang muka akibat keterlambatan pembayaran dalam jual beli kredit di toko elektronik Sony Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material maupun spritual, selalu berhubungan dan bertransaksi antara satu dan yang lain. Dalam berhubungan dengan orang lain inilah antara satu dengan yang lain sering terjadi interaksi. Dalam memenuhi kebutuhannya manusia dibatasi aturan-aturan dan hukum yang telah ditentukan oleh Tuhannya. Oleh karenanya Allah mengingatkan agar dalam pemenuhan kebutuhannya, manusia tidak saling merugikan satu sama lain, dalam hal ini tukar menukar keperluan antar anggota masyarakat adalah suatu jalan yang adil.

Dalam rangka memenuhi hajat hidup yang bersifat materil itulah masing-masing mengadakan ikatan yang berupa perjanjian-perjanjian atau akad-akad. Seperti jual beli, sewa-menyewa, *syirkah* dan sebagainya, yang semuanya itu tercakup dalam *mu'amalah*, jika dilaksanakan tanpa aturan-aturan dan norma yang tepat maka akan menimbulkan bencana kerugian dan kerusakan dalam masyarakat. Islam adalah agama yang mengatur seluruh kehidupan yang berhubungan dengan manusia, baik yang

⁴ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, ed. (Surabaya: Pustaka Penerbit Progresif, 1997), 370.

⁵ Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, ed. (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 16.

berhubungan dengan Allah maupun yang berhubungan dengan sesama manusia seperti di dalam pelaksanaan jual beli atau perniagaan.

Tentang transaksi jual beli, apakah praktek jual beli yang dijalankan oleh seseorang itu sudah sesuai dengan syari'ah Islam atau belum. Hal ini dilakukan agar mereka yang menggeluti dunia usaha dapat mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu menjadi sah atau tidak. Dalam ajaran Islam hubungan manusia dalam masyarakat agar tidak terjadi saling merugikan harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mudharat*. Karena itu, setiap praktek *mu'amalah* harus dijalankan dengan memelihara nilai-nilai keadilan dan menghindarkan unsur-unsur penganiayaan serta unsur-unsur penipuan.

Di Desa Bungkok Lampung Timur kebanyakan penjual yang melakukan jual beli dengan sistem pembelian secara tunai dan secara kredit, dengan ketetapan harga yang telah disepakati. Salah satunya di toko elektronik Sony yang menerapkan jual beli secara kredit, Jual beli secara kredit merupakan mekanisme jual beli dimana harga barang dibayarkan secara berkala (cicilan) dalam jangka waktu tertentu yang disepakati, dimana penjual harus menyerahkan barang secara kontan sedangkan pembeli dapat memiliki barang dengan harga yang relatif mahal namun tanpa harus membayar secara kontan atau tunai.⁶

Jual beli kredit pada saat ini dilaksanakan di toko elektronik Sony Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, dimana praktik tersebut terjadi antara pemilik toko elektronik Sony dengan pembeli. Praktik jual beli kredit barang elektronik tersebut dalam penerapannya pembeli akan memberikan uang muka (*panjar*) kepada penjual sebagai tanda jadi dan mengangsur sisa pembayarannya sesuai dengan perjanjian diawal.

Namun dalam penerapannya diduga pihak penjual (pemilik toko elektronik) akan melakukan penghapusan uang

⁶Moch. Daryah Sinungan, *Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, ed. (Bandung: Mandar Maju, 2003), 5.

muka (*panjar*) secara sepihak kepada pembeli barang elektronik yang mengalami kredit macet atau tunggakan dalam cicilan pembayaran. Maksudnya pihak penjual akan menghapus uang muka apabila pembeli menunggak cicilan pembayaran lebih dari 3 bulan dengan adanya penambahan waktu kredit, sedangkan dalam akad tidak ada perjanjian tersebut. Semestinya adanya kejelasan terlebih dahulu kepada pembeli terhadap kerugian yang akan ditanggung jika menunda pembayaran cicilan tersebut, agar tidak merugikan salah satu pihak.

Dengan demikian, praktik penghapusan uang muka akibat keterlambatan pembayaran dalam jual beli kredit yang dilakukan oleh toko elektronik Sony di Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur membuat peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisa apakah praktik tersebut diperbolehkan atau tidak dalam agama Islam. Oleh sebab itu peneliti mengangkat permasalahan ini sebagai objek penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penghapusan Uang Muka Akibat Keterlambatan Pembayaran Dalam Jual Beli Kredit (Studi Di Toko Elektronik Sony Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur)”.

C. Fokus Penelitian

Untuk lebih memfokuskan permasalahan yang akan diteliti lebih terarah, maka penulis dalam penelitian ini fokus pada tinjauan hukum Islam tentang praktik penghapusan uang muka akibat keterlambatan pembayaran dalam jual beli kredit.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penghapusan uang muka dalam jual beli kredit barang elektronik di toko elektronik Sony Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik penghapusan uang muka dalam jual beli kredit barang

elektronik di toko elektronik Sony Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur ?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan diatas sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik penghapusan uang muka dalam jual beli kredit barang elektronik di toko elektronik Sony Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur.
2. Untuk mengetahui praktik penghapusan uang muka dalam jual beli kredit barang elektronik di toko elektronik Sony Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur ditinjau dalam hukum Islam.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan dan pemahaman mengenai pandangan hukum Islam tentang penghapusan uang muka akibat keterlambatan pembayaran dalam jual beli kredit. Serta diharapkan dapat memperkaya *khazanah* pemikiran dari segi hukum Islam khususnya civitas akademik Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah.
2. Secara praktis
Penelitian ini di maksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun tinjauan pustaka yang terdapat sebagai informasi dari penulisan penelitian adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Agung Suryono fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Raden Intan Lampung yaitu berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Uang Muka Jual Beli Mobil Bekas Yang Dibatalkan". Hasil penelitian ini adalah menurut hukum Islam pembatalan akad

jual beli pesanan mobil bekas pada dasarnya sangat bertentangan, karena tidak sesuai dengan prosedur yang ada yaitu perjanjian tidak ditulis dengan secara detail serta tidak adanya kerelaan dari pihak pembeli yang sudah dibayar pada saat akad sehingga terjadinya uang muka (*panjar*) tersebut hilang atau hangus. Dalam praktiknya yaitu penjual bermuamalah dengan lisan dan tulisan di atas materai 6000 akan tetapi penjual tidak menjelaskan konsekuensi terhadap pembeli dalam melakukan akad yaitu bahwasanya apabila tidak melanjutkan uang muka atau membatalkan perjanjian dalam jual beli mobil maka uang muka hangus, perjanjian tersebut hasilnya tidak sah dalam perjanjian akad jual beli dalam Islam sehingga merugikan salah satu pihak.⁷ Berdasarkan hal tersebut, maka yang membedakan dalam penelitian penulis adalah tentang praktik penghapusan uang muka akibat keterlambatan pembayaran dalam jual beli kredit, dimana praktik tersebut tanpa adanya akad di awal.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Umi Maghfuroh fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang yaitu berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Uang Muka Dalam Perjanjian Pesanan Catering Yang Dibatalkan". Hasil penelitian ini adalah sesuai dengan akad yang telah disepakati bahwa antara pembeli dan penjual pada saat melakukan transaksi, pembeli bersedia memberikan uang muka (*panjar*) sebagai tanda jadi untuk memesan pesanan di Saras Catering, dan menyebutkan pesanan barang dengan kriteria tertentu jika pembeli membatalkan pesannya (tidak jadi membelinya) maka uang muka menjadi milik penjual. Akan tetapi uang muka tersebut belum dipakai penjual untuk apa-apa dalam arti belum dipakai untuk dibelanjakan, maka status uang muka dalam perjanjian jual beli pesanan catering yang dibatalkan di Saras Catering tersebut tidak sah menurut

⁷ Agung Suryono, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Uang Muka Jual Beli Mobil Bekas Yang Dibatalkan", (Studi Pada Pedagang Mobil Bekas di Bandar Lampung), (Study Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri, Raden Intan Lampung, 2019).

hukum Islam.⁸ Berdasarkan hal tersebut, maka yang membedakan dalam penelitian penulis adalah tentang praktik penghapusan uang muka akibat keterlambatan pembayaran dalam jual beli kredit, dimana uang muka (*panjar*) akan dihapus karena pembeli telat untuk membayar cicilan dan praktik tersebut tanpa adanya akad di awal.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Setopanggalih fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta yaitu berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Uang Muka (DP) Dalam Akad Sewa Menyewa". Hasil penelitian ini adalah Praktik penerapan sistem uang muka (DP) di Mukti Ayu Group merupakan kesepakatan kedua belah pihak. Namun pemilik boleh meminta uang pembayaran yakni uang muka sebagai tanda jadi. Hal ini dilakukan ketika ijab dan qobul untuk mengikat penyewa agar tidak berpaling ke penyewa lain. Jika penyewa membatalkan persewaan tersebut maka uang muka akan hangus/hilang. Sesuai dengan akad yang telah disepakati antara pemilik dengan penyewa pada saat melakukan transaksi, penyewa bersedia memberikan uang muka sebagai tanda jadi berdasarkan paket yang dipilih. Jika penyewa membatalkan persewaan maka uang muka menjadi milik pemilik persewaan alat pesta. Meskipun uang muka belum dipakai pemilik untuk apa-apa, sistem sewa menyewa di Mukti Ayu Group tidak sah dalam hukum Islam dan juga golongan ulama berpendapat menurut Hanafiyah, Malakiyah, dan Syafi'iyah bahwa jual beli urbun hukumnya fasid (rusak), namun akad transaksinya tidak batal karena dalam jual - beli seperti ini termasuk memakan harta orang lain secara bathil, karena disyaratkan bagi penjual tanpa ada kompensasinya.⁹ Berdasarkan hal tersebut, maka yang membedakan dalam

⁸Umi Maghfuroh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Uang Muka Dalam Perjanjian Pesanan Catering Yang Dibatalkan", (Studi Kasus Di Saras Catering Semarang). (Study Program Sarjana Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010).

⁹ Setopanggalih, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Uang Muka (DP) Dalam Akad Sewa Menyewa", (Studi Kasus Di Persewaan Alat Pesta Mukti Ayu Group Desa Kauman, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo). (Study Program Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019).

penelitian penulis adalah tentang praktik penghapusan uang muka akibat keterlambatan pembayaran dalam jual beli kredit, dimana uang muka (*panjar*) akan dihapus karena pembeli telat untuk membayar cicilan dan praktik tersebut tanpa adanya akad di awal.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau diresponden.¹⁰ Melakukan penelitian dilapangan untuk memperoleh data atau informasi dengan mendatangi secara langsung objek yang bersangkutan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah bersifat *deskriptif analisis*, yakni suatu penelitian yang menjelaskan atau menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dalam proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana agar mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi dilapangan.

2. Sumber Data Penelitian

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi. Data primer dianggap lebih baik dari data sekunder, hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu data primer lebih bersifat terperinci dari data sekunder. Data primer diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian, seperti data primer yang diperoleh dari hasil wawancara kepada responden. Yaitu kepada pemilik toko, karyawan dan pembeli.

¹⁰ Susiadi, *Metode Penelitian*, ed. (Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 9.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah bahan data yang berisikan tentang informasi yang menjelaskan dan membahas tentang data primer. Peneliti menggunakan data sekunder sebagai data pendukung yang berhubungan dengan data penelitian. Sumber data sekunder yang digunakan oleh penulis adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, diantaranya yaitu: Al-Qur'an, hadits, buku, kitab-kitab fiqih, skripsi, dan literatur-literatur lainnya yang mendukung.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah awal yang paling penting dilakukan dalam suatu penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Maka untuk teknik pengumpulan data yang diperlukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Metode Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara memperhatikan sesuatu melalui pengamatan terhadap suatu objek penelitian.¹¹ Observasi dilakukan secara langsung terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan.

b. Metode Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara dimana peneliti mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada responden. *Interview* dilakukan kepada informan yaitu orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi, data *interview* dapat diperoleh dari hasil wawancara kepada responden yang terdiri dari pemilik toko, karyawan dan pembeli, serta pihak-pihak yang dianggap mengetahui tentang penelitian ini.

¹¹ Didin Fatihudin, *Metode Penelitian*, ed. (Sidoarjo : Zifatama Publisher, 2014), 119.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu langkah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berdasarkan catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah foto, dokumen rapat, dan agenda.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti yang dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi bukan hanya sekedar objek atau subjek yang dipelajari tetapi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki subjek atau objek itu.¹² Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pemilik toko, karyawan dan pembeli barang elektronik Sony di Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur yang berjumlah 14 orang yang terdiri dari 1 orang pemilik toko, 3 orang sebagai karyawan, dan 10 orang pembeli dalam 2 bulan yang salah satunya ada 5 orang yang diduga uang muka nya di hapuskan.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk itu sampel yang diambil harus betul-betul *representative* (mewakili). Sampel juga merupakan sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti. Dalam hal ini sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu data yang memiliki kelompok subjek didasari atas ciri-ciri dan sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkutan yang erat dengan ciri-ciri dan sifat-sifat yang sudah diketahui sebelumnya.¹³ Dikarenakan kasus uang muka yang dihapuskan hanya 5 orang jadi sampel nya adalah 9 orang yang terdiri dari 1

¹² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, ed. (Bandung : Alfabeta cv, 2011), 81.

¹³ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, ed. (Jakarta: Renaka Cipta, 1996), 104.

orang pemilik toko, 3 orang sebagai karyawan, dan 5 orang yang diduga uang muka nya di hapuskan.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Metode pengolahan data yang dilakukan setelah data terkumpul baik berupa data primer atau data sekunder, langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan dengan menilai apakah data yang telah dikumpulkan tersebut cukup lengkap dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.¹⁴

b. Sistematika data (*systematizing*)

Sistematika data yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.

c. Penandaan data (*coding*)

Penandaan data adalah pemberian kode atau mengubah keterangan ke dalam bentuk angka dan karakter.

6. Analisis Data

Setelah keseluruhan data dikumpulkam maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam analisis data digunakan data kualitatif, karena data yang diperoleh dari literatur yang ada dilapangan, kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu penelitian untuk memberikan gambaran atau deskriptif tentang keadaan yang dilakukan

¹⁴Moh. Prabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, ed. (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), 58.

secara objektif, kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung analisis.

Metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan pendekatan induktif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan penghapusan uang muka akibat keterlambatan pembayaran dalam jual beli kredit.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah penelitian skripsi ini ada 5 bab yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, terdapat halaman sampul, halaman judul, abstrak, surat pernyataan, persetujuan, pengesahan, moto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar dan daftar isi.

Pada bab pendahuluan berisi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Pada bab dua landasan teori yaitu berkaitan dengan fiqh muamalah, jual beli, jual beli kredit menurut fiqh Islam, dan jual beli bayar di muka (*ba'i al- 'urbun*).

Pada bab tiga atau laporan penelitian terdapat gambaran umum lokasi penelitian dan penyajian fakta data penelitian, serta data tentang praktik penghapusan uang muka akibat keterlambatan pembayaran dalam jual beli kredit.

Pada bab keempat analisis penelitian yaitu berisikan analisis data penelitian dan temuan yang ada dilokasi penelitian tersebut yang berkaitan dengan praktik penghapusan uang muka dalam jual beli kredit barang elektronik Sony di Desa Bunguk Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

Pada bab lima atau penutup memuat tentang simpulan dan rekomendasi hasil-hasil penelitian, kemudian pada bagian akhir berisi daftar rujukan, lampiran, daftar pernyataan wawancara, surat perizinan, surat telah melakukan penelitian dan bukti bimbingan.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli (*Al-Bai'*)

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (*barter*). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.¹ Sementara secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam terminology fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-bai'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.

Ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli. Salah satunya adalah Imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya, nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab kabul atau saling memberi. Adanya klausul membawa manfaat untuk mengecualikan tukar menukar yang tidak membawa manfaat bagi para pihak, seperti tukar menukar dirham dengan dirham, atau tukar menukar barang yang tidak disenangi atau tidak dibutuhkan seperti bangkai, debu dan seterusnya.

Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-bai'*), yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum

¹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, ed. (Depok: Rajawali Pers, 2018), 21.

Ekonomi Syariah, bai' adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.²

Adapun definisi jual beli secara istilah, menurut Taqi' al-Din ibn Abi Bakr ibn Muhammad al-Husayni, adalah pertukaran harta dengan harta yang diterima dengan menggunakan *ijab* dan *qabul* dengan cara yang diizinkan oleh *syara'*. Menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan. Menurut Abu Muhammad Mahmud al-Ayni, pada dasarnya jual beli merupakan penukaran barang dengan barang yang dilakukan dengan suka sama suka, sehingga menurut pengertian *syara'*, jual beli adalah tukar menukar barang atau harta secara suka sama suka.³

Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah tukar menukar barang atau sejenisnya. Al-Syarbini dalam kitab Mugni al-Mukhtaj mendefinisikannya:

مُقَابَلَةُ مَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

"Pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu"⁴

Berdasarkan pemaparan berbagai definisi tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Objek jual beli berupa barang yang diperjualbelikan dan uang pengganti barang tersebut. Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli, karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak maka jual beli tidak sah.

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, ed. (Jakarta : Prenadamedia Group, 2012), 101.

³ Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, ed. (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), 156.

⁴ Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 22.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari mu'amalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, Al-Sunnah dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar mu'amalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.

a. Dasar dalam Al-Qur'an

1) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

Surat Al-Baqarah ayat 282 :

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

"Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli"

2) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu".

3) Firman Allah dalam surat Al-Nisa' ayat 29

يٰۤأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

b. Dasar dalam Al-Sunnah

Dasar hukum yang berasal dari Al-Sunnah antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi' al- Bazar dan Hakim

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيْ الْكَسْبِ
أَطْيَبُ أَوْ أَفْضَلُ قَالَ : "عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ"

*“Rasulullah Saw. bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan)”.*⁵

- 2) Rasulullah Saw. Bersabda:

عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ
وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

*“Dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi S'aid dari Nabi Saw, bersabda : pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatannya di surga) dengan para Nabi, shiddiqin dan syuhada'.*⁶

⁵ Ibid, 24.

⁶ Ibid.

c. Ijma'

Sementara legitimasi dari ijma' adalah ijma' ulama dari berbagai kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai mu'amalah melalui system *barter* telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.⁷

Selain itu ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁸

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab kabul*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud ilaih* (objek akad).⁹ Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya ada satu, yaitu *ijab*. Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika telah terjadi *ijab*, disitu jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya *ijab*, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti para pihak yang berakad, objek jual beli dan nilai tukarnya.

Jumhur ulama menetapkan empat rukun jual beli, yaitu : para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), *sighat* (lafal *ijab* dan *kabul*), barang yang diperjualbelikan, dan nilai tukar pengganti barang.

⁷ *Ibid*, 25.

⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, ed. (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 75.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 70.

Adapun rukun dan syarat jual beli sebagai berikut :

a. Penjual dan Pembeli

Syaratnya adalah:

- 1) Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah dalam jual beli.
- 2) Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa), orang yang melakukan jual beli dengan jalan suka sama suka.
- 3) Tidak mubazir (pemboros), sebab harta orang yang mubazir itu ditangan walinya.

Firman Allah Swt.:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja.”
(An-Nisa: 5)

- 4) *Baligh* (berumur 15 tahun ke atas/dewasa). Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil; karena jika tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.

b. Uang dan Benda yang dibeli

Syaratnya yaitu :

- 1) Suci. Barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak.
- 2) Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil

tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan (memboroskan) harta yang terlarang dalam kitab suci.

- 3) Barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam laut, barang rampasan yang masih berada ditangan yang merampasnya, barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya (kecohan).
- 4) Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya, atau yang mengusahakan.
- 5) Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli; zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak terjadi kecoh mengecoh.

c. *Lafaz Ijab dan Kabul*

Ijab adalah perkataan penjual, umpamanya, “Saya jual barang ini sekian.” *Kabul* adalah ucapan si pembeli, “Saya terima (saya beli) dengan harga sekian.” Keterangannya yaitu ayat yang mengatakan bahwa jual beli itu suka sama suka, dan juga sabda Rasulullah Saw dibawah ini :

أَتَمَّالْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ . رواه ابن حبان

“*Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka.*” (Riwayat ibnu Hibban).¹⁰

Sedangkan suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu bergantung pada hati masing-masing. Ini pendapat kebanyakan ulama. Tetapi Nawawi, Mutawali, Bagawi, dan beberapa ulama yang lain berpendapat bahwa *lafaz* itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adat

¹⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, ed. (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1998), 279.

kebiasaan saja. Apabila menurut adat telah berlaku bahwa hal yang seperti itu sudah dipandang sebagai jual beli, itu saja sudah cukup karena tidak ada suatu dalil yang jelas untuk mewajibkan lafaz.

Menurut ulama yang mewajibkan *lafaz*, *lafaz* itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat :

- 1) Keadaan *ijab* dan *kabul* berhubungan. Artinya, salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
- 2) Makna keduanya hendaklah mufakat (sama) walaupun *lafaz* keduanya berlainan.
- 3) Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti misal, “Kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian.”
- 4) Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun tidak sah.

Apabila rukun atau syaratnya kurang, jual beli tersebut dianggap tidak sah.¹¹

d. Nilai Tukar (Harga Barang)

Terkait masalah nilai tukar ini, para ulama fiqh membedakan *ats-tsaman* dengan *as-si'r*. Menurut mereka, *ats-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen.

Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *ats-tsaman*. Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *ats-tsaman* sebagai berikut :

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.

¹¹ *Ibid*, 282.

- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqa'yadhah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *syara'*, seperti babi dan *khamar*, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam *syara'*.¹²

Sementara syarat jual beli ada empat macam, yaitu syarat terpenuhinya akad (*syurut al-in'iqad*), syarat pelaksanaan jual beli (*syurut al-nafadz*), syarat sah (*syurut al-sihhah*), dan syarat mengikat (*syurut al-luzum*). Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.¹³

a. Syarat Terpenuhinya Akad (*syurut al-in'iqad*)

Syarat *in'iqad* adalah syarat harus terpenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut *syara'*. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka akad jual beli menjadi batal. Di kalangan ulama tidak ada kesepakatan mengenai syarat *in'iqad* ini.

Hanafiah mengemukakan empat macam syarat untuk keabsahan jual beli:

- 1) syarat berkaitan dengan '*aqid*' (orang yang melakukan akad), yaitu penjual dan pembeli ada dua yaitu : pertama, *aqid* harus berakal yakni *mumayyiz*. Maka tidak sah akad yang dilakukan oleh orang gila, dan anak yang belum berakal (belum *mumayyiz*). Hanafiah tidak mensyaratkan '*aqid* harus *baligh*. Dengan demikian, akad yang dilakukan oleh anak yang *mumayyiz* (mulai umur tujuh tahun), hukumnya sah. Kedua, '*aqid* (orang yang melakukan akad) harus berbilang (tidak sendirian). Dengan demikian, akad yang dilakukan oleh satu orang yang mewakili dua pihak hukumnya tidak sah, kecuali apabila dilakukan oleh ayah yang membeli barang dari anaknya yang

¹² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ed. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 118.

¹³ Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 25.

masih dibawah umur dengan harga pasaran. Hal ini oleh karena dalam jual beli terdapat dua hak yang berlawanan, yaitu menerima dan menyerahkan.

- 2) syarat berkaitan dengan akad itu sendiri, syarat akad yang sangat penting adalah bahwa *qabul* harus sesuai dengan *ijab*, dalam arti pembeli menerima apa yang diijabkan (dinyatakan) oleh penjual. Apabila terdapat perbedaan antara *qabul* dan *ijab* misalnya pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan oleh penjual, maka akad jual beli tidak sah.
- 3) syarat berkaitan dengan tempat akad, adalah *ijab* dan *qabul* harus terjadi dalam satu majelis. Apabila *ijab* dan *qabul* berbeda majelisnya, maka akad jual beli tidak sah.
- 4) syarat berkaitan dengan objek akad (*ma'qud alaih*), adalah sebagai berikut barang yang dijual harus *maujud* (ada), barang yang dijual harus *mal mutaqawwim* (bisa diambil manfaatnya), Barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki, Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli.¹⁴

b. Syarat Pelaksanaan Jual Beli (*syurutul-nafadz*)

Untuk pelaksanaan jual beli diperlukan dua syarat sebagai berikut :

- 1) Kepemilikan atau Kekuasaan, kepemilikan adalah menguasai sesuatu dan mampu men-*tasarufkan*-nya sendiri, karena tidak ada penghalang yang ditetapkan oleh *syara'*. Sedangkan wilayah atau kekuasaan adalah kewenangan yang diberikan oleh *syara'* sehingga dengan adanya kewenangan itu maka akad yang dilakukannya hukumnya sah dan dapat dilangsungkan.
- 2) Pada benda yang dijual (*mabi'*) tidak terdapat hak orang lain. Apabila di dalam barang yang dijadikan

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ed. (Jakarta: Amzah, 2010), 187-189.

objek jual beli itu terdapat hak orang lain, maka akadnya *mauquf* dan tidak bisa dilangsungkan.

Dilihat dari segi syarat *nafadz* ini, jual beli dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu : Pertama, jual beli *nafidz* (bisa dilangsungkan) yaitu jual beli yang rukunnya syarat *in'iqad* dan syarat *nafadz*-nya terpenuhi. Kedua, jual beli *mauquf* (ditangguhkan) yaitu jual beli yang rukunnya dan syarat *in'iqad*-nya terpenuhi, tetapi syarat *nafadz*-nya tidak terpenuhi.¹⁵

c. Syarat Sah Jual Beli (*syurut al-sihhah*)

Syarat sah ini terbagi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut *syara'*. Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam '*aib*':

- 1) Ketidakjelasan (*jahalah*), yang dimaksud disini adalah ketidakjelasan yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Ketidakjelasan ini ada empat macam, yaitu : pertama, ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli. Kedua, ketidakjelasan harga. Ketiga, ketidakjelasan masa (tempo), seperti dalam harga yang diangsur, atau dalam *khiyar syarat*. Dalam hal ini waktu harus jelas, apabila tidak jelas maka akad menjadi batal. Keempat, Ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan.
- 2) Pemaksaan (*al-ikrah*), adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya. Paksaan ini ada dua macam: Pertama, paksaan *absolute* yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat, seperti akan dibunuh, atau dipotong anggota badannya. Kedua, paksaan *relative* yaitu paksaan yang lebih ringan, seperti dipukul. Kedua ancaman ini mempunyai pengaruh terhadap

¹⁵ *Ibid*, 193-194

jual beli, yakni menjadikannya jual beli yang *fasid* menurut jumhur Hanafiah, dan *mauquf* menurut Zufar.

- 3) Pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*), yaitu jual beli dengan dibatasi waktunya. Seperti: "Saya jual baju ini kepadamu untuk selama satu bulan atau satu tahun". Jual beli semacam ini hukumnya *fasid*, karena kepemilikan atas suatu barang tidak bisa dibatasi waktunya.
- 4) Penipuan (*gharar*), yang dimaksud disini adalah penipuan dalam sifat barang. Seperti: seseorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh liter, padahal kenyataannya paling banyak dua liter. Akan tetapi apabila ia menjualnya dengan pernyataan bahwa air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka termasuk syarat yang *shahih*. Akan tetapi, apabila *gharar* (penipuan) pada wujud (adanya) barang maka ini membatalkan jual beli.
- 5) Kemudharatan (*dharar*), Kemudharatan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Seperti seseorang menjual baju (kain) satu meter, yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa baju (kain) tersebut dipotong, walaupun hal itu merugikan penjual.
- 6) Syarat-syarat yang merusak, yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam *syara'* dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad. Seperti, seseorang menjual rumah dengan syarat ia (penjual) boleh tinggal di rumah itu selama masa tertentu setelah terjadinya akad jual beli.¹⁶

¹⁶ *Ibid*, 190-192

d. Syarat Mengikatnya Jual Beli (*syurut al-luzum*).

Untuk mengikatnya (*luzum-nya*) jual beli disyaratkan akad jual beli terbebas dari salah satu jenis *khiyar* yang membolehkan kepada salah satu pihak untuk membatalkan akad jual beli, seperti *khiyar syarat*, *khiyar ru'yah*, dan *khiyar 'aib*. Apabila didalam akad jual beli terdapat salah satu dari jenis *khiyar* ini maka akad tersebut tidak mengikat kepada orang yang memiliki hak *khiyar*, sehingga ia berhak membatalkan jual beli atau meneruskan atau menerimanya.¹⁷

4. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Jual beli yang dilarag dalam syariah cukup banyak. Wahbah Al-Juhaili meringkasnya sebagai berikut :

a. Terlarang sebab *Ahlian* (Ahli Akad)

Tidak sah jual beli apabila dilakukan oleh:

- 1) Jual beli orang gila, Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk.
- 2) Jual beli anak kecil, Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara sepele.
- 3) Jual beli orang buta, dikategorikan *sahih* menurut jumhur jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.
- 4) Jual beli terpaksa, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad.
- 5) Jual beli *fudhul*, adalah jual beli milik seorang tanpa seizin pemiliknya.
- 6) Jual beli orang yang terhalang, terhalang karena kebodohan ataupun sakit.

¹⁷ *Ibid*, 195

b. Terlarang sebab *Sighat*

Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama antara lain:

- 1) Jual beli *Mu'athah*, adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ijab-qabul*.
- 2) Jual beli melalui surat atau melalui utusan, disepakati ulama fiqih bahwa jual-beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari *aqid* pertama kepada *aqid* kedua. Jika *qabul* melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah.
- 3) Jual beli dengan isyarat atau tulisan, disepakati keshahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati *aqid*. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), maka akad tidak sah.
- 4) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad, Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli ini sah sebab tidak memenuhi syarat *in'iqad* (terjadinya akad).
- 5) Jual beli tidak bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*, hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama.
- 6) Jual beli *Munjiz*, adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini, dipandang *fasid* menurut ulama Hanafiyah, dan batal menurut jumhur ulama.

c. Terlarang sebab barang jualan (*Ma'qud 'Alaih*)

Beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, jumhur ulama sepakat bahwa jual beli ini tidak sah.

- 2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan *syara'*.
- 3) Jual beli *gharar*, jual beli yang mengandung kesamaran. Hal itu dilarang dalam Islam sebab Rasulullah Saw. bersabda yang artinya “Janganlah kamu membeli ikan di dalam air karena jual beli seperti itu termasuk *gharar* (menipu)”. (HR. Ahmad).
- 4) Jual beli barang yang najis dan terkena najis, Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis, seperti *khamar*.
- 5) Jual beli air, disepakati bahwa jual beli air yang dimiliki, seperti air sumur atau yang disimpan ditempat pemiliknya dibolehkan oleh jumhur ulama Madzhab empat. Sebaliknya ulama Zhahiriyyah melarang secara mutlak.
- 6) Jual beli barang yang tidak jelas (*Majhul*), menurut ulama Hanafiyah jual beli seperti itu adalah *fasid*, sedangkan menurut jumhur batal sebab akan mendatangkan pertentangan diantara manusia.
- 7) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad (*ghaib*), tidak dapat dilihat. Menurut ulama hanafiyah, jual beli seperti ini dibolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya, tetapi pembeli berhak *khiyar* ketika melihatnya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan tidak sah, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya bila disebutkan sifat-sifatnya dan mensyaratkan 5 macam, yaitu: harus jauh sekali tempatnya, tidak boleh dekat sekali tempatnya, bukan pemiliknya harus ikut memberikan gambaran, harus meringkas sifat-sifat barang secara menyeluruh, penjual tidak boleh memberikan syarat.
- 8) Jual beli sesuatu sebelum dipegang, ulama hanafiyah melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan sebelum dipegang, tetapi untuk barang yang tetap

dibolehkan. Sebaliknya, ulama syafi'iyah melarangnya secara mutlak.

- 9) Jual beli buah-buahan atau Tumbuhan, apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad, setelah ada buah tetapi belum matang akadnya *fasid* menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut Jumhur ulama.

d. Terlarang sebab *Syara'*

beberapa masalah yang diperselisihkan diantara para ulama, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Jual beli riba, riba *nasiah* dan riba *fadhil* adalah *fasid* menurut ulama Hanafiyah, tetapi batal menurut Jumhur ulama.
- 2) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan, menurut ulama Hanafiyah termasuk *fasid* (rusak) dan terjadi akad atas nilainya, sedangkan menurut jumhur ulama adalah batal sebab ada *nash* yang jelas dari hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah Saw. mengharamkan jual beli *khamar*, bangkai, anjing, dan patung.
- 3) jual beli barang dari hasil pecegatan barang, yakni mencegat pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan mendapatkan keuntungan.
- 4) Jual beli waktu *adzan* Jum'at, yakni bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan shalat Jum'at.
- 5) Jual beli anggur untuk dijadikan *khamar*, menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah *zahirnya sahih*, tetapi makruh, sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah batal
- 6) Jual beli orang tua tanpa anaknya yang masih kecil, hal itu dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri.
- 7) Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain, seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun masih dalam *khiyar*, kemudian datang orang

lain yang menyuruh untuk membatalkannya sebab ia akan membelinya dengan harga yang lebih tinggi.

- 8) Jual beli memakai syarat, menurut ulama Hanafiyah sah jika syarat tersebut baik, seperti “Saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian yang rusak dijahit dulu”. ulama malikiyah membolehkannya jika bermanfaat, ulama Syafi’iyah dibolehkan jika syarat *maslahat* bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad, sedangkan menurut ulama Hanabilah, tidak boleh jika hanya bermanfaat bagi salah satu akad.¹⁸

5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Manfaat dan hukmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain:

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara *bathil*.
- c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.
- d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).
- e. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridho terhadap anugerah Allah SWT.
- f. Dapat menciptakan hubungan silaturrahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.¹⁹

Menurut Al Jazairi (2000), hikmah disyariatkannya jual beli ialah seorang Muslim bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan dengan sesuatu yang ada di tangan saudaranya tanpa kesulitan yang berarti. Sedangkan hikmah jual beli menurut As Shan’ani (1995) adalah bahwa kebutuhan

¹⁸ Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, ed. (Bandung: Alfabeta, 2014), 151-155.

¹⁹ Agung Suryono, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Uang Muka Jual Beli Mobil Bekas Yang Dibatalkan” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019), 43.

manusia tergantung dengan apa yang ada pada orang lain (temannya); sedangkan temannya itu terkadang tidak mau memberikannya kepada orang lain. Maka dalam syariat jual beli itu terdapat sarana untuk sampai kepada maksud itu, tanpa dosa.²⁰

6. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam yaitu: jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

a. Jual beli ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli

Dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin yang dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul *Fiqh Muamalah*, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga macam yaitu:²¹

- 1) jual beli benda yang kelihatan, ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Seperti membeli beras dipasar.
- 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, ialah jual beli *salam* (pesanan), yang dimaksud dengan jual beli pesanan ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- 3) jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

²⁰ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, ed. (Surakarta: Erlangga, 2012), 111.

²¹ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 75.

b. Jual beli ditinjau dari segi pelaku akad (*subjek*)

Jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

- 1) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan, adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.
- 2) Akad jual beli yang dilakukan melalui utusan, perantara, tulisan, surat menyurat sama halnya dengan *ijab kabul* dengan ucapan, misalnya via Pos dan Giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui Pos dan Giro, jual beli seperti ini diperbolehkan menurut *syara*'.
- 3) Akad jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah*, adalah mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab kabul*, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual.²²

c. Jual beli berdasarkan pertukarannya

Secara umum dibagi empat macam :

- 1) Jual beli saham (pesanan), adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.
- 2) Jual beli *muqayadhah* (barter), adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
- 3) Jual beli *muthlaq*, adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

²² *Ibid*, 78.

- 4) Jual beli alat penukar dengan alat penukar, adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.
- d. Jual beli berdasarkan segi harga
Dibagi menjadi empat bagian:
 - 1) Jual beli yang menguntungkan (*al-murabbahah*).
 - 2) Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*)
 - 3) Jual beli rugi (*al-khasarah*).
 - 4) Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.²³
- e. Jual beli dilihat dari segi *sighat*-nya
Dibagi menjadi dua bagian :
 - 1) Jual beli *mutlaq*, yaitu jual beli yang dinyatakan dengan *sighat* (redaksi) yang bebas dari kaitannya dengan syarat dan sandaran kepada masa yang akan datang.
 - 2) Jual beli *ghair mutlaq*, yaitu jual beli yang *sighat*-nya (redaksinya) dikaitkan atau disertai dengan syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang.²⁴

Jumhur fuqaha' membagi jual beli kepada *shahih* dan *bathil*, yakni:

 - a. Jual beli *shahih*, yaitu jual beli yang disyariatkan menurut asal dan sifat-sifatnya terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terkait dengan hak orang dan tidak ada hak *khiyar* di dalamnya. Jual beli *shahih* menimbulkan implikasi hukum, yaitu berpindahnya kepemilikan, yaitu barang berpindah miliknya menjadi milik pembeli dan harga berpindah miliknya menjadi milik pembeli.
 - b. Jual beli *ghairu shahih*, yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak mempunyai

²³ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 101.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 204.

implikasi hukum terhadap objek akad, masuk dalam kategori ini adalah jual beli *bathil* dan jual beli *fasid*, yakni :

- 1) Jual beli *bathil* yaitu jual beli yang tidak disyariatkan menurut asal dan sifatnya kurang salah satu rukun dan syaratnya. Misal, jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum, seperti gila atau jual beli terhadap benda yang tidak dibenarkan memanfaatkannya secara *syar'i*, seperti bangkai dan narkoba.²⁵
- 2) Jual beli *fasid*, yaitu jual beli yang disyariatkan menurut asalnya. Namun, sifatnya tidak. Misalnya jual beli itu dilakukan oleh orang yang pantas (*ahliyah*) atau jual beli benda yang dibolehkan memanfaatkannya. Namun, terdapat hal atau sifat yang tidak di-*syariat*-kan pada jual beli tersebut yang mengakibatkan jual beli itu menjadi rusak.²⁶

B. Jual Beli Secara Kredit (*Ba'i bit Taqsith*)

1. Pengertian Jual Beli Kredit (*Ba'i bit Taqsith*)

Kredit dalam bahasa Arabnya disebut *Ba'i bit Taqsith* yang pengertiannya menurut istilah syari'ah, ialah menjual sesuatu dengan pembayaran yang diangsur dengan cicilan tertentu, pada waktu tertentu, dan lebih mahal daripada pembayaran kontan/tunai.²⁷

Jual beli dengan sistem kredit adalah jual beli yang dilakukan tidak secara kontan dimana pembeli sudah menerima barang sebagai objek jual beli, namun belum membayar harga, baik keseluruhan maupun sebagian. Pembayaran dilakukan secara angsur sesuai dengan

²⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 71.

²⁶ *Ibid*, 80.

²⁷ Nilna Mayangkencana Sirait, "Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Kenaikan Harga Dalam Transaksi Kredit," *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, Vol. 6, No. 1, (2020): 76, <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/index>.

kesepakatan. Sulaiman bin Turki mendefinisikan jual beli kredit:

عقد على مبيع حال , بضمن مؤجل , يؤدى مفرقاً على
أجزاء معلومة , في أوقات معلومة

“Jual beli dimana barang diserahkan terlebih dahulu, sementara pembayaran dilakukan beberapa waktu kemudian berdasarkan kesepakatan.”²⁸

Ulama dari empat mazhab, Syafi’iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanbaliyah, Zaid bin Ali dan mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan sistem ini, baik harga barang yang menjadi objek transaksi sama dengan harga *cash* maupun lebih tinggi. Namun demikian mereka mensyaratkan kejelasan akad, yaitu adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa jual beli itu memang dengan sistem kredit. Dalam transaksi semacam ini biasanya si penjual menyebutkan dua harga, yaitu harga *cash* dan harga kredit. Si pembeli harus jelas hendak membeli dengan *cash* atau kredit. Sebagai deskripsi untuk memperjelas, Ahmad hendak menjual mobilnya, ia menawarkannya kepada Burhan “Burhan, belilah mobilku ini, kalau *cash* 100 juta, kalau kredit selama satu tahun 120 juta.” Kemudian burhan menjawab “Oke, aku beli dengan system kredit 120 juta selama setahun.” maka transaksi seperti ini diperbolehkan.²⁹

Memang ada kemiripan antara riba dan tambahan harga dalam system jual beli kredit. Namun, adanya penambahan harga dalam jual beli kredit adalah sebagai ganti penundaan pembayaran barang. Ada perbedaan yang mendasar antara jual beli kredit dengan riba. Allah menghalalkan jual beli termasuk jual beli kredit karena adanya kebutuhan. Sementara mengharamkan riba karena adanya penambahan pembayaran murni karena penundaan.

²⁸ Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*, 49.

²⁹ *Ibid*, 50.

Selain itu, tambahan yang diberikan merupakan barang sejenis dari yang diberikan salah satu pihak, misalnya emas dengan emas, beras dengan beras dan sebagainya. Sementara dalam jual beli kredit, si pembeli mendapatkan barang dan penjual menerima pembayaran dalam bentuk uang, artinya dari barter ini dari jenis barang yang berbeda. Tambahan yang diberikan oleh pembeli system kredit menjadi pengganti untuk penjual yang telah mengorbankan sejumlah uangnya berhenti pada si pembeli untuk beberapa waktu, padahal bila uang tersebut berada ditangan penjual, bisa jadi dikembangkan atau sebagai tambahan modal usaha.³⁰

2. Hukum Jual Beli Kredit

Ada dua pendapat ulama mengenai hukum jual beli dengan system kredit, ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Pendapat pertama mengatakan diperbolehkan menambah harga sebagai ganti atas penundaan pembayaran. Ulama yang berpendapat demikian antara lain adalah jumhur ulama, termasuk ulama empat mazhab, ulama salaf dan ulama-ulama kontemporer. Ibnu Qudamah menyatakan:

وقد روي عن طاووس والحكم وحماد أنهم قالوا: لا بأس أن
يقول: أبيعك بالنقد كذا وبالنسيئة كذا

“Diriwayatkan dari Thaus, Hikkam, dan Hammad mengatakan ‘Tidak menjadi masalah bila anda mengatakan : Aku jual barang ini dengan harga kontan sekian dan kredit sekian.’”³¹

Jumhur ulama yang memperbolehkan jual beli kredit berhujjah dengan ayat, hadis dan kaidah fiqihiah:

a. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

³⁰ Ibid, 52.

³¹ Ibid, 53.

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Keumuman ayat ini menunjukkan dihalalkannya jual beli, baik dilakukan dengan dua harga *cash* dan kredit maupun jual beli hanya dengan harga *cash*.

- b. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk membayar harga secara kredit diperbolehkan, asalkan tempo atau waktu ditentukan dan jumlah pembayarannya telah ditentukan sesuai kesepakatan”.

- c. Hadis riwayat Aisyah ra.:

عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ جَاءَتْ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ
إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ , فِي كُلِّ عَامٍ وَفِيَّةٌ

“Dari Aisyah ra. berkata ‘Burairah menebus dirinya dari majikan dengan membayar Sembilan awaq setiap tahun.’”³²

Hal ini tidak diingkari oleh Nabi, bahkan beliau menyetujuinya. Tidak ada perbedaan, apakah harga sama dengan harga kontan atau ditambah karena adanya tempo pembayaran.

- d. Ulama yang memperbolehkan jual beli dengan system kredit juga berhujjah dengan kaidah :
“Pada dasarnya hukum mu’amalah adalah halal, kecuali ada dalil yang melarangnya.”

³² Ibid, 55.

Tidak ada dalil yang melarang jual beli dengan system kredit, berdasarkan kaidah diatas, maka berarti jual beli semacam ini halal. Hal ini dikembalikan ke hukum dasar mu'amalah, yaitu halal. Transaksi seperti ini juga berbeda dengan riba *nasi'ah*, karena jual beli kredit pertambahan harga sebagai ganti atas barang yang dijual dan tempo yang diberikan. Sementara dalam riba *nasi'ah* pertambahan uang hanya sebagai ganti atas penundaan pembayaran utang.³³

Kalangan ulama yang melarang jual beli kredit antara lain Zainal Abidin bin Ali bin Husen, Nashir, Manshur, Imam Yahya, dan Abu Bakar al- Jashash dari kalangan Hanafiyah serta sekelompok ulama kontemporer. Mereka berargumen dengan ayat, hadis Nabi dan dalil aqliyah:

- a. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Ayat diatas mengharamkan riba, termasuk tambahan harga karena pembayaran sebagai pengganti penundaan pembayaran.

- b. Hadis riwayat Abu Hurairah :

عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا

"Dari Abu Hurairah Radiallahu'anhu bahwa Rasulullah Saw bersabda: barang siapa menjual dengan dua bai'ah dalam satu bai'ah (melakukan satu akad untuk dua transaksi), maka ia harus memilih harga yang paling rendah atau riba."³⁴

³³ Ibid, 57.

³⁴ Ibid, 59.

- c. Dalil *aqliyah* antara lain, pengambilan tambahan harga karena penundaan pembayaran dalam transaksi jual beli sama halnya dengan pengambilan tambahan pembayaran dalam *qiradh*. Pengambilan tambahan pembayaran karena penundaan pembayaran dalam *qiradh* diharamkan, maka sama saja apabila diterapkan dalam transaksi jual beli.

Jumhur menyanggah argument ulama yang melarang penambahan harga hampir terjadi dalam semua system jual beli dan ini berlaku umum. Penambahan harga dalam jual beli tidaklah dilarang, kecuali tambahan-tambahan yang merugikan atau mengandung unsur *dzalim*. Tambahan-tambahan yang terlarang telah dijelaskan dalam hadis mengenai barter barang- barang komoditi yang sejenis.

Selain itu, harga bukan termasuk komoditi yang terukur dengan takaran atau timbangan, oleh karena itu tidak dapat dikategorikan riba. Tambahan yang dilarang adalah yang disyaratkan sejak awal sebelum terjadinya transaksi, adapun tambahan yang terjadi saat akad, maka bukanlah riba yang terlarang.³⁵

Berdasarkan keterangan-keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa jumhur ulama membolehkan menentukan harga kredit lebih tinggi daripada harga kontan, selama jual beli tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam menentukan harga secara umum.

Syarat-syarat dan *qawa'idul bai'* yang bertalian dengan jual beli secara kredit antara lain:

- a. Harga barang ditentukan dan diketahui oleh pihak penjual dan pembeli.
- b. Pembayarannya sudah diketahui oleh kedua belah pihak dan rentang waktunya dibatasi.
- c. Harga semula yang sudah disepakati bersama tidak boleh dinaikkan lantaran pelunasannya melebihi waktu yang telah ditentukan.

³⁵ *Ibid*, 60.

- d. Hendaknya pihak pembeli bertujuan menggunakannya secara pribadi atau menjualkannya kembali sebagai barang dagangan, bukan bertujuan untuk mengeruk keuntungan dengan cara melakukan *hillah* (tipu daya), sehingga tergolong *bai' tawarruq* yang dilarang oleh Nabi SAW.
- e. Termasuk kategori digunakan pribadi, manakala orang yang hendak menikah membeli sesuatu lalu menjualnya kembali demi memenuhi kebutuhan pernikahannya untuk memelihara pandangan dan menjaga harga diri. Maka yang seperti ini boleh, lebih-lebih bagi orang yang mau menikah dan terpaksa harus menjual barang yang dibelinya. Seorang pedagang tidak boleh mengeksploitasi kebutuhan pembeli dengan cara menaikkan harga terlalu tinggi melebihi harga pasar yang berlaku.³⁶

C. Jual Beli *Urbun* (persekot)

1. Pengertian Jual Beli *Urbun* (persekot)

Panjar dalam bahasa Arab adalah '*Urbun* (العربون). Kata ini memiliki padanan kata (sinonim) dalam bahasa Arabnya yakni, *Urbaan* (الأربان), '*Urbaan* (العربان) dan *Urbun* (الأربون). Secara bahasa artinya yang jadi transaksi dalam jual beli. Berkata penulis kitab Al Misbah Al Munier "Al Arabun dengan difathkan huruf 'Ain dan Ra'nya."³⁷

Jual beli *urbun* yaitu jual beli yang dilakukan dengan perjanjian pembeli menyerahkan uang seharga barang jika ia setuju jual beli dilaksanakan. Akan tetapi, jika ia membatalkan jual beli, uang yang telah dibayarkan menjadi hibah bagi penjual.³⁸

³⁶ Muhibbuddin, "Kredit: Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, vol. 13, No. 2, (2017): 240, <https://doi.org/10.30603/am.v13i2.912>

³⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 118.

³⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, 79.

Sedangkan jual beli dengan persekot yang dikutip dari buku Ibnu Rusyd yaitu dalam bentuk, jika seseorang membeli sesuatu dengan memberikan sebagian harga kepada penjual, dengan syarat bahwa apabila jual beli tersebut terjadi antara keduanya, maka sebagian harga yang telah diberikan itu termasuk dalam harga seluruhnya. Sedang jika jual beli itu tidak terjadi, maka sebagian harga yang telah diberikan itu menjadi milik penjual dan tidak bisa dituntut kembali.³⁹

Bentuk jual beli ini dapat diberi gambaran sebagai berikut:

- a. Sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seseorang pembeli barang kepada si penjual. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka menjadi milik si penjual.
- b. Atau seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang dan menyatakan, “Apabila saya ambil barang tersebut maka ini adalah bagian dari nilai harga dan bila saya tidak jadi mengambil (barang itu), maka uang (DP) tersebut untukmu”.
- c. Atau seorang membeli barang dan menyerahkan kepada penjualnya satu dirham atau lebih dengan ketentuan apabila si pembeli mengambil barang tersebut, maka uang panjar tersebut dihitung pembayaran dan bila gagal maka itu milik penjual. Jelas disini bahwa system jual beli ini dikenal dalam masyarakat kita dengan pembayaran DP atau uang jadi.⁴⁰

Jual beli panjar adalah pembeli membeli barang dan dia membayar sebagian uang mukanya kepada si penjual. Jika jual beli dilaksanakan, panjar dihitung sebagai pembayaran, dan jika tidak panjar diambil oleh penjual dengan dasar sebagai alat penghibahan untuknya dari si penjual.

³⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, ed, (Semarang: Asy-Syifa, 1990), 80.

⁴⁰ <http://www.konsultasisyariah.com/jual-beli-sistem-uang-muka-dp/>, (diakses pada tanggal 12 Oktober 2021, jam 20.00 WIB).

2. Hukum Jual Beli *Urbun*

Jual beli *urbun* (persekot) dalam persoalan ini kebanyakan ulama *amshar* (negeri-negeri besar) mengatakan bahwa jual beli tersebut tidak boleh. Sedangkan diriwayatkan dari segolongan *tabi'in*, bahwa mereka membolehkannya. Di antara mereka adalah Mujahid, Ibnu Sirin, Nafi' bin al-Harts dan Zaid bin Aslam.⁴¹

Dalam hal ini Jumhur ulama berpendapat jual beli dengan cara ini terlarang dan tidak sah. Sementara menurut Hanafiyah, jual beli ini *fasid*. Ulama lain menyatakan jual beli ini bathil berdasarkan hadis Nabi :

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ

“Dari Amru ibn Syu’aib diterima dari bapaknya dari kakeknya, sesungguhnya Nabi Saw. melarang jual beli *urbun* (pakai persekot).⁴²

Madzhab Syafi’I mengharamkan jual beli ‘*urbun*. Mereka berpendapat bahwa jual beli ini tidak sah. Transaksi ini dinyatakan sebagai jual beli batil, yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau tidak sesuai dengan syari’at. Jual beli ‘*urbun* dianggap jual beli yang tidak sesuai dengan syari’at karena dapat merugikan salah satu pihak yang melakukannya.

Shaykh Abu Bakr Jabir al Jazairi dalam kitabnya *Minhaj al Muslim* mengatakan “Seorang muslim tidak diperbolehkan mengadakan transaksi ‘*urbun* atau mengambil uang muka yang telah diserahkan oleh pembeli, sama sekali, karena diriwayatkan dari Nabi saw, bahwa beliau melarang transaksi ‘*urbun*.⁴³

⁴¹ *Ibid*, 79.

⁴² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, 79.

⁴³ Abu Bakr Jabir al Jazairi, *Minhaj al Muslim*, ed. (Madinatul Munawwarah: Dar umar Ibn Khattab, 1964), 320.

Ilal yang terdapat dalam larangan *bai' al-urbun* adalah karena terdapat dua syarat uang muka yang sudah dibayarkan kepada penjual itu hilang (tidak bisa kembali lagi) dan mengembalikan barang kepada si penjual, jika penjualan dibatalkan.

Dalil hukum yang tidak memperbolehkan *ba'i 'urbun* adalah :

- a. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, al-Nasai, Abu Dawud, dan Malik dari 'Amr bin Syu'aib, beliau mengatakan Rasulullah Saw. Melarang jual beli *Urban*. (HR. Ahmad, al-Nasai, Abu Dawud, dan Malik dari 'Amr bin Syu'aib).
- b. *Ba'i al-Urban* diharamkan karena didalam nya terdapat syarat (perjanjian) yang *fasid* (rusak).
- c. *Ba'i al-Urban* mengandung ketidak jelasan (*gharar*) terhadap pembeli. Oleh sebab itu, termasuk *ba'i al-gharar*. Sedangkan *gharar* itu adalah sesuatu yang diharamkan.⁴⁴

Imam Ahmad membolehkan jual beli '*urbun*, berdalil kepada hadits yang diriwayatkan dari Nafi' bin Abdul Harits, bahwa dia membelikan untuk Umar sebuah rumah guna dijadikan penjara. Dari Shafwan bin Umayyah dengan harga 4000 (empat ribu) dirham. Jika Umar rela jual beli dilaksanakan dan jika tidak Shafwan mendapatkan 400 (empat ratus) dirham yang menjadi panjarnya.

Ibnu Sirin dan Ibnu Al Musayyad berpendapat: Tidak apa-apa jika ia tidak menyukai barang, ia mengembalikannya dan mengembalikan sebagian panjar. Ibnu Umar membolehkan.⁴⁵ Ada juga tabiin yang membolehkan *ba'i al-urban*, seperti Mujahid bin Jabir, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Najih dari Mujahid, beliau (mujahid) berkata: Bolehnya hukum jual beli dengan memakai uang panjar.

⁴⁴ Rieici Oktapia Rani, "Panjar dalam Jual Beli Sistem Tebasan Perspektif Hukum Islam" (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2020), 48.

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, ed. (Bandung: Alma'arif, 1997), 93.

Dalil hukum Islam yang memperbolehkan *Ba'i al-Urban* adalah Firman Allah SWT

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^{٤٦}

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah (2) : 275).

Ayat diatas memiliki bersifat umum, yakni berhubungan dengan halalnya jual beli, kecuali terdapat dalil yang jelas dari Al-Qur'an maupun Hadits yang melarangnya. Begitu juga dalam hal *ba'i al-urban* yang tidak ditemukan *hadis sahih* berhubungan dengan keharamannya jual beli tersebut. Oleh sebab itu jual beli tersebut secara hukum adalah *mubah* (boleh) karena zatnya (*mubah lidzatihi*).⁴⁶



⁴⁶ *Ibid*, Rieici Oktapia Rani, "Panjar dalam Jual Beli Sistem Tebasan Perspektif Hukum Islam", 46.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Al Jazairi, Abu Bakr Jabir. *Minhaj al Muslim*, Madinatul Munawwarah: Dar umar Ibn Khattab. 1964.
- Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Renaka Cipta. 1996.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga. 2012.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasan, Alwi dan Dendi Sugono. *Telaah Bahasa dan Sastra*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2002.
- Idri. *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta : Prenadamedia Group. 2015.
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012.
- Mahmudah, Siti. *Historisitas Syari'ah (Kritik Relasi-Kuasa Khalil 'Abd al-Karim*. Yogyakarta: LkiS pelangi Aksara. 2016.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta : Prenadamedia Group. 2012.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Penerbit Progresif. 1997.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010

Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers. 2018.

Pelangi, Laskar. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press. 2013.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru Algensindo. 1998.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatu'l Mujtahid*. Semarang: Asy-Syifa. 1990.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: Alma'arif. 1997.

Sinungan, Moch Daryah. *Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit*. Bandung: Mandar Maju. 2003.

Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2015.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta cv. 2011.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.

Tika, Moh Prabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta : Bumi Aksara. 2006.

Widijowanti, Dijan. *Hukum Dagang*, Yogyakarta : CV. And. 2012.

Jurnal

- Muhibbuddin, "Kredit: Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, vol. 13, No. 2, 2017, (On-Line) Tersedia di: <https://doi.org/10.30603/am.v13i2.912>. (Diakses pada Selasa, 28 September 2021, Pukul 11.09 WIB)
- Nilna Mayangkencana Sirait, "Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Kenaikan Harga Dalam Transaksi Kredit," *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, Vol. 6, No. 1, Desember 2020, (On-Line) Tersedia di: <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/index>. (Diakses pada Rabu, 22 September 2021, Pukul 19.00 WIB)
- Skripsi Agung Suryono, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Uang Muka Jual Beli Mobil Bekas Yang Dibatalkan", (Studi Pada Pedagang Mobil Bekas di Bandar Lampung), (Study Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri, Raden Intan Lampung, 2019).
- Skripsi Umi Maghfuroh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Uang Muka Dalam Perjanjian Pesanan Catering Yang Dibatalkan", (Studi Kasus Di Saras Catering Semarang). (Study Program Sarjana Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010).
- Skripsi Setopanggalih, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Uang Muka (DP) Dalam Akad Sewa Menyewa", (Studi Kasus Di Persewaan Alat Pesta Mukti Ayu Group Desa Kauman, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo). (Study Program Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019).
- Skripsi Rieici Oktapia Rani, "Panjar dalam Jual Beli Sistem Tebasan Perspektif Hukum Islam", (Studi di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu). (Study Program Sarjana Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020).

Sumber Online

Jual Beli Sistem Uang Muka, (On-Line) tersedia di <http://www.konsultasisyariah.com/jual-beli-sistem-uang-muka-dp/>, (diakses pada tanggal 12 Oktober 2021, jam 20.00 WIB).

Wawancara

Adam, “Penghapusan Uang Muka Dalam Jual Beli Kredit Barang Elektronik”, *Wawancara*, Juni 16, 2021.

Dahlan, “Penghapusan Uang Muka Dalam Jual Beli Kredit Barang Elektronik”, *Wawancara*, Juni 16, 2021.

Imam, “Penghapusan Uang Muka Dalam Jual Beli Kredit Barang Elektronik”, *Wawancara*, Juni 16, 2021.

Ramadhan, “Penghapusan Uang Muka Dalam Jual Beli Kredit Barang Elektronik”, *Wawancara*, Juni 16, 2021.

Siswoyo, “Penghapusan Uang Muka Dalam Jual Beli Kredit Barang Elektronik”, *Wawancara*, Juni 18, 2021.

Sony, “Penghapusan Uang Muka Dalam Jual Beli Kredit Barang Elektronik”, *Wawancara*, Juni 15, 2021.

Wanto, “Penghapusan Uang Muka Dalam Jual Beli Kredit Barang Elektronik”, *Wawancara*, Juni 16, 2021.

Yamin “Penghapusan Uang Muka Dalam Jual Beli Kredit Barang Elektronik”, *Wawancara*, Juni 18, 2021.

Yuliana, “Penghapusan Uang Muka Dalam Jual Beli Kredit Barang Elektronik”, *Wawancara*, Juni 16, 2021.